

## ABSTRAK

### **Vivi Afriani: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Izin Usaha Pengelolaan Tambang Timah di Wilayah Penambangan Rakyat (Studi Kasus Di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur)**

Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan dan kekuatan finansial yang berbeda memaksa untuk saling membutuhkan satu sama lain, seperti yang terjadi di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur, yang rata-rata lahan di Desa tersebut terdapat banyak akan hasil timah, hal ini yang menjadikan masyarakat menambang timah secara ilegal di lahan desa tersebut, hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat setempat, karena hasil tambang timah yang lumayan dapat mencukupi kebutuhan hidup menjadi penyebab penambang melakukan tambang timah di wilayah penambangan rakyat tanpa surat izin.

Dalam praktiknya pertambangan ini diduga tidak sesuai dengan aturan hukum islam, dimana akad kontrak perjanjiannya tidak sesuai dengan peraturan akad *ijarah*, dan dalam praktiknya penambang yang menambang di wilayah penambangan rakyat tanpa surat izin, bisa menjual hasil tambang timah nya ditempat yang tidak di tetapkan oleh pemerintah, sehingga pendapatan yang di dapat oleh penambang di wilayah tersebut bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, dibandingkan dengan penambang yang sudah memiliki surat izin usaha penambangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik izin usaha penambangan di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur tersebut dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap izin usaha penambang di wilayah penambangan rakyat di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara langsung kepada para penambang dan pemerintah desa yang menjadi subjek dari penelitian ini, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh penambang timah di wilayah penambangan rakyat mengambil keuntungan atau penghasilan secara batil, dimana dalam pelaksanaan akad antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa tentang pemberian lahan ini hanya dilakukan secara lisan, dan penambang yang telah diberikan lahan tidak menepati janji untuk membuat surat izin usaha agar para penambang bisa menambang secara legal di wilayah penambangan rakyat sehingga hal tersebut mengakibatkan wanprestai.

**Kata Kunci:** Pertambangan, Izin Usaha